

Implementasi Program Penyediaan Air Minum Dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas) Di Pulau Siau Kabupaten Kepulauan Siau Tangulandang Biaro

Petter Yoseph Sollar¹

Sarah Sambiran²

Welly Waworundeng³

Email Korespondensi: Petersollar52@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, mendeskripsikan, dan menganalisis Implementasi Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) di Pulau Siau Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro. Melihat berbagai tantangan yang dihadapi untuk memberikan pelayanan air minum dan sanitasi yang memadai maka tercetuslah program third water supply and sanitation for low income community (WSLIC) yang kemudian dikenal sebagai PAMSIMAS (Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat) dalam rangka menciptakan masyarakat hidup bersih dan sehat melalui penyediaan pelayanan air bersih dan sanitasi. Pelaksanaan program PAMSIMAS dilandasi dengan kebijakan Pemerintah yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025. RPJPN mengamanatkan pada akhir periode RPJM 2015-2019 layanan dasar air minum dan sanitasi dapat dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian disimpulkan bahwa Dari aspek Komunikasi yang menjadi faktor penentu kebijakan Pamsimas di Pulau Siau Kabupaten SITARO, belum dilaksanakan secara optimal seperti yang ada di Desa Sawang kurangnya partisipasi dan responsive dari masyarakat beberapa masyarakat yang hanya ingin mengikuti arahan dari pemerintah yang sesuai dengan partai politik yang di pilih, Di Desa Sawang dan Desa Balirangen masih kurang pelatihan dalam peningkatan kapasitas sumber daya manusia agar dapat paham program Pamsimas

Kata Kunci: Implementasi, Program, Pamsimas

¹Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan FISPOL-Unsrat

²Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan FISPOL-Unsrat

³Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan FISPOL-Unsrat

Pendahuluan

Berdasarkan pada data dari BPS (Badan Pusat Statistik) tahun 2019 dapat diketahui bahwa Jumlah penduduk di Kecamatan Siau Timur Selatan sebanyak 8.173 jiwa dengan kepadatan penduduk 283,88 jiwa/km², terdapat 14 Kecamatan dan 49 lindongan/dusun dan desa dengan jumlah penduduk terbanyak adalah Desa Sawang dengan jumlah penduduk 909 jiwa, sedangkan desa dengan jumlah paling sedikit adalah Desa Kalihiang dengan jumlah penduduk 255 jiwa terdapat 6 desa penerima pamsimas di kecamatan siau timur selatan, peneliti mengambil sampel dalam melihat penerapan Program PAMSIMAS di desa yang menjadi lokasi penerima program pamsimas di kecamatan siau timur selatan tahun 2019 adalah Desa Sawang dan Desa balirangen termasuk daerah yang kebanyakan masyarakatnya berpenghasilan menengah kebawah, rata-rata masyarakat bekerja sebagai nelayan, dan buruh. Kebanyakan masyarakat setempat sangat sulit mendapatkan air bersih. dengan adanya program PAMSIMAS ini diharapkan masyarakat mendapatkan pelayanan air bersih dengan harga yang murah dan sanitasi yang baik dan melibatkan partisipasi masyarakat dalam proses pelaksanaan dan keberlangsungannya.

Tabel 1.1. Daftar Desa Sasaran Program PAMSIMAS III Tahun Anggaran 2019 di Kecamatan Siau Timur Selatan Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro

No.	Nama Desa	Nama Kecamatan	Target Penerima Manfaat air minum (Jiwa)	Resoliasi Kegiatan (%)
1	Sawang	Siau Timur Selatan	909	100
2	Biau	Siau Timur Selatan	510	100
3	Balirangen	Siau Timur Selatan	691	100
4	Tapile	Siau Timur Selatan	502	100
5	Buhias	Siau Timur Selatan	740	100

keterangan: Realisasi Kegiatan(%) menurut laporan di website resmi PAMSIMAS, akan tetapi yang terjadi dilapangan tidak ditemukan

Dari 6 (enam) desa sasaran pemanfaatan tersebut, dapat dilihat realisasi kegiatan dilapangan dilaporkan telah 100%, namun menurut data dilapangan yang dilihat ada beberapa desa yang pemanfaatannya masih belum optimal, setelah adanya program PAMSIMAS, pada awalnya masyarakat merasa sangat terbantu karena memperoleh sarana air bersih yang lebih murah, akan tetapi di dalam pelaksanaannya kerap mendapatkan hambatan-hambatan dan permasalahan terkait berupa finansial, teknis, sumber daya, maupun partisipasi dari masyarakatnya itu sendiri, maka dari observasi awal peneliti, permasalahan yang muncul adalah tidak semua masyarakat di desa penerima bantuan PAMSIMAS memenuhi kebutuhan air bersih Seperti masalah yang ada di Desa Sawang, dimana sarana air bersih yang baru dibangun kurang lebih dua tahun yang lalu belum optimal masih butuh pengembangan dalam pembangunan fisik yaitu jaringan pipa untuk mengaliri air di setiap rumah, ditambah lagi kurangnya dana dalam pembangunan fisik sehingga menghambat keberhasilan program. Sedangkan di desa balirangen yang juga merupakan desa penerima pamsimas dimana sarana air bersih yang di bangun kurang lebih dua tahun yang lalu sudah terbangun jaringan pipa, namun di Desa Balirangen masalah lain yaitu masih kekurangan debit air sehingga distribusi air bersih ke rumah-rumah belum maksimal dan juga dikarenakan

kurangnya air yang teraliri ke rumah-rumah sehingga masyarakat mengeluh kepada pemerintah daerah setempat.

Menurut asumsi awal peneliti Permasalahan di atas di latar belakang oleh beberapa hal baik itu yang berasal dari masyarakat maupun dari lembaga pelaksana/pengelola. Pertama, prinsip kebutuhan manusia yang tidak terbatas sementara sumber daya untuk memenuhinya adalah terbatas merupakan salah satu latar belakang terjadinya permasalahan-permasalahan di atas. Tidak bisa dipungkiri populasi yang semakin banyak menuntut pelayanan sarana yang semakin besar pula. Kedua, kurang koordinasi antara BP-SPAMS (Badan Pengelola Sarana Penyediaan Air Bersih Dan Sanitasi) dan BUMDES dengan masyarakat dalam menghadapi persoalan-persoalan yang ada, sehingga sulit mencari solusi yang tepat dan diterima seluruh masyarakat. Ketiga, sebelum pelaksanaan program pihak pelaksana kurang melakukan pengamatan mengenai geografis daerah yang diberikan bantuan, sehingga konsep pembagian air secara adil tidak dirasakan sama oleh seluruh masyarakat..

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro selaku Kabupaten pelaksana program PAMSIMAS. Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro merupakan Kabupaten dengan Hampir 90% wilayahnya merupakan wilayah perdesaan dan kebanyakan masyarakat bekerja sebagai nelayan yang tidak memiliki penghasilan menentu. Menurut BPS (Badan Pusat Statistik) Provinsi Sulawesi Utara,

Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro merupakan bentuk wilayah yang masih kurang air bersih dikarenakan memiliki perbukitan dan bergunung, dan memiliki kemiringan lereng yang curam dan masih banyak penduduk yang masih menggunakan air hujan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Hal tersebut menunjukkan bahwa permasalahan ketersediaan air bersih dan sanitasi layak, serta peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro masih menjadi perhatian yang serius.

Secara teknis penelitian ini akan dilaksanakan di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Kabupaten SITARO selaku koordinator program PAMSIMAS, dan Kecamatan Siau Timur.

Fokus Penelitian ini berfokus pada Implementasi Kebijakan Kebun Raya sebagai Kawasan Konservasi Tumbuhan di Kecamatan Ratatotok. Fokus penelitian ini menitikberatkan melalui teori dari George C. Edward III (Nawawi, 2009:138) di dalam Irsanya (2015:16) mengemukakan beberapa hal yang dapat mempengaruhi keberhasilan suatu implementasi, yaitu:

1. Comunication (Komunikasi)
2. Resources (Sumber Daya)
3. Disposition (Disposisi)
4. Bureaucratic Structure (Struktur Birokrasi).

Teknik pengumpulan data merupakan cara yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data-data penelitian dari sumber data yakni:

1. Wawancara
2. Observasi
3. Dokumentasi

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data induktif. Analisis data induktif adalah penarikan kesimpulan yang

berangkat dari fakta-fakta khusus, untuk kemudian ditarik kesimpulan secara umum. Adapun langkah-langkah untuk menganalisis data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: Pengumpulan data, Reduksi data, Display Data dan Pengambilan Keputusan.

Pembahasan

1. Komunikasi

Komunikasi diartikan sebagai proses penyampaian informasi komunikator kepada komunikan. Selain itu juga dalam komunikasi implementasi kebijakan terdapat tujuan dan sasaran kebijakan yang harus disampaikan kepada kelompok sasaran, hal tersebut dilakukan agar mengurangi kesalahan dalam pelaksanaan kebijakan.

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti dapati di lapangan lewat wawancara dengan beberapa informan di lapangan, dimana Pengurus Pamsimas Kabupaten Kepulauan SITARO sudah dengan baik menerapkan fungsi komunikasi kepada masyarakat dengan adanya sosialisasi kepada masyarakat terkait program Pamsimas di Kabupaten Kepulauan SITARO. Menurut kepala desa balirangen program pamsimas sudah berjalan dengan baik dari segi sosialisasi yang telah dilaksanakan oleh tim kerja pamsimas berupa rapat di kantor desa dan pengumuman informasi di media sosial akan tetapi pendapat berbeda ditemukan desa sawang yang mana kepala desa sawang mengemukakan bahwa proses sosialisasi masih belum berlajalan dengan baik dikarenakan ada beberapa masyarakat yang hanya ingin mengikuti arahan dari pemerintah yang sesuai dengan partai politik yang di pilih masyarakat tersebut sehingga menimbulkan perbedaan pendapat.

Selain itu terdapat juga kendala lain pada saat mengumpul massa untuk menghadiri sosialisasi terhalang dengan stigma masyarakat bahwa jika ada sosialisasi dan kegiatan apapun harus menerima uang atau uang duduk. adanya ketidaksukaan masyarakat kepada Pemerintah Desa yang membuat sulitnya komunikasi dijalankan kemudian perihal soal masyarakat sendiri menurut pendapat masyarakat Desa Balirangen tentang program pamsimas sudah tersosialisasikan dengan baik namun dari masyarakat desa sawang sudah tersosialisasikan namun belum direspon dengan baik. Dari pengurus pamsimas sendiri sudah melakukan seperti di buku pedoman Program yang meliputi sosialisasi. Dari pengurus sendiri sudah melakukan sosialisasi mengenai perilaku dan layanan hidup bersih dan sehat melalui STBM (Sanitasi Total Berbasis Masyarakat). Berdasarkan hasil penelitian, peneliti menilai komunikasi antar aktor sudah berjalan baik di Desa balirangen namun tidak dengan Desa Sawang masing belum sesuai dengan prosedur Pedoman.

2. Sumber Daya

Sumber Daya adalah salah satu penunjang terlaksananya sebuah Kebijakan, sumber daya merupakan kebutuhan-kebutuhan yang akan di perlukan dalam menjalankan kebijakan agar dapat berjalan sesuai dengan yang telah di rencanakan. Sumber daya yang dapat mendukung pelaksanaan kebijakan dapat berwujud, seperti sumber daya manusia, dan sumber daya anggaran, sumber daya peralatan, sumber daya informasi dan kewenangan.

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti telah lakukan terkait sumber daya yang menjadi salah satu indikator berjalannya Implementasi

Kebijakan ini. Lewat wawancara dengan beberapa informan di lapangan, di dapati bahwa pengimplementasian sumber daya manusia yang masih belum sesuai dalam program Pamsimas ini. Lewat wawancara dengan beberapa informan dilapangan di dapati bahwa pengeimplementasian sumber daya manusia yang masih belum sesuai dalam pedoman Pamsimas . Seperti yang terjadi di Desa Sawang dan Desa Balirangen kurangnya sumber daya manusia untuk melaksanakan tugas sehingga mempengaruhi Proses implementasi Program Pamsimas Terdapat juga anggaran Ketika kebijakan dibuat maka harus ada sebuah anggaran untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Anggaran program Pamsimas di Desa Sawang berasal dari APBN dan dan dari APBDes yang total dana keseluruhan sebesar Rp. 351.669.000, dana dari pemerintah pusat dan daerah sebesar 246.572.000, Dana Swambada Masyarakat ada in cash sebesar 14.000.000 dan ada in kind (gotong royong) yang dihitung uang sebesar 56.097.000 dan Dana dari APBDes 35.000.000 dan Anggaran program Pamsimas di Desa Balirangen berasal dari APBN, Dana Swambada Masyarakat dan dan dari APBDes yang total dana keseluruhan sebesar Rp. 354.072.000. dana dari pemerintah pusat dan daerah sebesar 245.000.000, Dana swambada Masyarakat ada in cash Rp. 69.999.990 dan dari APBDes yaitu 35.000.000. dalam hal peningkatan kapasitas sumber daya manusia dari pihak pamsimas sendiri masih kurang dalam melakukan pelatihan untuk meningkatkan pengetahuan tentang program pamsimas. Untuk sarana dan prasarana sendiri masih dalam tahap-tahap pembangunan untuk desa

Sawang sehingga penyaluran air ke rumah-rumah belum maksimal dikarenakan susah mencari sumber air yang berada di area pegunungan tetapi berbeda dengan Desa Balirangen sarana dan prasana sudah memadai dilihat dari sumber air yang sangat memadai dikarenakan adanya sungai -sungai dan titik-titik sumber air yang lumayan dekat dengan pemukiman warga sehingga menunjang penyaluran air dengan baik sesuai dengan prosedur.

3. Disposisi

Disposisi adalah watak atau karakteristik yang dimiliki oleh pelaksana kebijakan. Disposisi itu seperti komitmen, kejujuran, dan sifat demokratis. Apabila pelaksana kebijakan mempunyai karakteristik atau watak yang baik, maka dia akan melaksanakan kebijakan dengan baik sesuai dengan sasaran tujuan dan keinginan pembuat kebijakan.

Dalam penerapan program pamsimas ini bisa berjalan walau belum sesuai pedoman tentunya ada dukungan dari pemerintah daerah dalam menunjang penuh berjalannya program pamsimas ini. Dari Pemerintah Desa balirangen sangat mendukung penuh terkait, begitu juga dengan masyarakat yang sangat membantu penuh sampai program ini sampai tercapainya pembangunan di Desa. Namun dari Pemerintah Desa Sawang program pamsimas belum berjalan dengan baik dikarenakan lambatnya respon Pemerintah Daerah dalam mempersiapkan kebijakan untuk menunjang Program Pamsimas. Kemudian masih belum ada komitmen yang pasti dari pihak Pemerintah Desa sendiri dan dari semua masyarakat dalam mendukung penuh Program ini, hal ini bisa dilihat dari banyak kekurangan dalam proses

pembangunan dan sosialisasi program dari Pengurus Pamsimas.

4. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi merupakan suatu badan yang paling sering terlibat dalam implementasi kebijakan secara keseluruhan. Struktur Organisasi yang bertugas melaksanakan kebijakan memiliki pengaruh besar terhadap pelaksanaan kebijakan.

Terkait jalanya kegiatan-kegiatan, kita disini bersama pengurus kabupaten dan pengurus desa bersama-sama membahas segala hal yang diperlukan itu dengan melibatkan tim kerja masyarakat desa yang akan mengeksekusi atau melaksanakannya. Namun peneliti menemukan bahwa pelaksanaan Pengurus Pamsimas masih belum maksimal dalam melakukan tugasnya mendampingi mengarahkan Pengurus di desa di bidang administrasi keuangan. Selain itu juga menemukan kurangnya pelaksana tugas di desa sehingga pelaksana beberapa tugas hanya di kerjakan satu orang bahkan jika tidak ada bisa mengerjakan maka tugas tersebut akan terbengkalai dan menemukan kurangnya inisiatif dalam menjalankan tugas akibatnya tugas menjadi terhambat sehingga menimbulkan keterlambatan dalam pelaporan. Sementara itu di Desa balirangen terdapat kendala yang hampir sama dengan Desa Sawang yaitu kurangnya arahan dari Pengurus Pamsimas dalam bidang administrasi keuangan. Dari sisi tanggung jawab semua bertanggung jawab atas tugas-tugasnya masing-masing, tetapi memang ada yang kurang maksimal beberapa yang peneliti sebutkan di atas.

Penutup

Kesimpulan

1. Dari aspek Komunikasi yang menjadi faktor penentu kebijakan Pamsimas di Pulau Siau Kabupaten SITARO, belum dilaksanakan secara optimal seperti yang ada di Desa Sawang kurangnya partisipasi dan responsive dari masyarakat beberapa masyarakat yang hanya ingin mengikuti arahan dari pemerintah yang sesuai dengan partai politik yang di pilih masyarakat tersebut sehingga menimbulkan perbedaan pendapat selain itu juga terdapat stigma kepada masyarakat soal kegiatan sosialisasi harus adanya uang duduk adanya ketidaksukaan masyarakat kepada Pemerintah Desa yang membuat sulitnya komunikasi dijalankan namun berlainan dengan Desa Balirangen dari aspek Komunikasi sudah berjalan dengan baik masyarakat merespon baik sosialisasi Program Pamsimas dan sudah berjalan sesuai dengan prosedur Pedoman Pamsimas.
2. Dari aspek Sumber daya yang menjadi faktor penentu kebijakan Pamsimas di Pulau Siau Kabupaten SITARO, kebutuhan sumber daya manusia sebagai bagian dominan dalam menjalankan Program Pamsimas . Di Desa Sawang dan Desa Balirangen masih kurang pelatihan dalam peningkatan kapasitas sumber daya manusia agar dapat paham program Pamsimas. Dari aspek anggaran sudah cukup memadai untuk menjalankan Program Pamsimas kemudian untuk sarana dan prasarana di Desa Sawang masih

belum maksimal dalam tahap pembangunan penyaluran air di rumah-rumah. Berbeda dengan Desa Balirangen yang dilihat dari sarana dan prasarana sudah memadai dan penyaluran air ke rumah-rumah sudah tersalurkan dengan baik.

3. Dari aspek Disposisi yang menjadi faktor penentu kebijakan Pamsimas di Pulau Siau Kabupaten SITARO, di sini implementor sebagai subjek pelaksana yaitu pemerintah daerah kurang responsive dalam menjalankan Program Pamsimas serta kurangnya dukungan dari Pemerintah Desa dan Masyarakat dalam menunjang Program ini berbeda dengan Desa Balirangen yang pemerintah Desanya dan Masyarakat sangat mendukung Program Pamsimas ini sehingga Program Pamsimas dapat berjalan sesuai dengan pedoman yang ada.
4. Dari aspek Struktur Birokrasi yang menjadi faktor penentu keberhasilan Program Pamsimas menjadi perhatian khusus di sini mengenai Pengurus Pamsimas dalam mendampingi dan mengarahkan pengurus Desa Sawang di bidang administrasi keuangan. Kemudian di Desa Balirangen terdapat masalah yang sama dengan Desa Sawang kurangnya pelatihan dan arahan sehingga terhambatnya menjalankan Program Pamsimas. Dari sisi tanggung jawab antar bidang sudah berjalan cukup baik untuk menopang Program Pamsimas

Saran

1. Perlu adanya sosialisasi yang tepat dari implementor tentang pentingnya air bersih dan sanitasi

serta berikan edukasi kepada masyarakat tentang hak politik baik dan benar. Perlu di jaga pula komunikasi antar Pemerintah Desa dan masyarakat agar demi menjaga tidak terjadinya konflik internal.

2. Perlu di tambah sumber daya manusia sehingga dapat menjalankan tugas – tugas terkait Program Pamsimas lebih maksimal. Terkait dengan pembangunan sarana dan Prasarana perlu di percepat lagi agar prosedur penyaluran air bisa cepat di rasakan masyarakat.
3. Pemerintah daerah harus lebih responsive dalam menunjang kegiatan dan program dari pamsimas agar program ini lebih cepat dan lebih merata dirasakan masyarakat. Lebih khusus dari Pemerintah Desa agar lebih sigap dan tanggap dalam menjalankan Program Pamsimas.
4. Lebih di perdalam hubungan Pamsimas dengan Pengurus Desa lebih khusus dalam hal mengarahkan pengurus desa dalam pengelolaan administrasi Program Pamsimas di desa.

Daftar Pustaka

- Hardiansyah, Haris. 2012. Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu
Suaib, Muhammad Ridha. 2016. Pengantar Kebijakan Publik, Yogyakarta: Calpulis.
- Winarno, Budi. 2007. Kebijakan Publik: Teori dan Proses. Yogyakarta: Media Pressindo
- Moleong, J. Lexy. 2007. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Rangkuti, Freddy. 2013. Analisis SWOT : Teknik Membedah Kasus Bisnis. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

- Syafiie, Inu Kencana. 2017. Ilmu Pemerintahan, Jakarta : Bumi Aksara.
- Sugiyono, 2019. Metode Penelitian Kualitatif dan R&D, Bandung: Alfabeta
- Moenir,HA.S. 2002. Manajemen Pelayanan Publik Di Indonesia. Jakarta: Bumi Aksara
- Nugroho, R. (2003). Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi. PT Elex Media Komputindo: Jakarta.
- Nugroho, R. (2006). Kebijakan Publik untuk Negara-Negara Berkembang. PT Elex Media Komputindo: Jakarta.
- Nugroho, R. (2011). Public Policy. PT Elex Media Komputindo: Jakarta.
- PAMSIMAS,2018,Rencana Kerja Masyarakat (RKM),Balirangan,Siau Tagulandang Biaro
- Fitriani, Meisy M. 2020. Implementasi Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) di Desa Puhsarang Kecamatan Semen Kabupaten Kediri

Sumber lain

- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 13/PRT/M/2013 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Air Minum
- Undang-Undang Pasal 5 Nomor 7 Tahun 2004
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air
- Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 ayat 3 tentang Bumi, air dan kekayaan alam
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
- Undang-Undang No.25 Tahun 2009 tentang pelayanan Publik
- Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air
- Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
- PAMSIMAS,2016,Pedoman umum Program Pamsimas,Jakarta
- PAMSIMAS,2018,Rencana Kerja Masyarakat (RKM),Sawang,Siau Tagulandang Biaro